

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kepercayaan masyarakat tentang kekuatan dari sebuah laporan itu merupakan salah satu hal yang menjadikan perlu dilakukan pemeriksaan laporan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban akan suatu peristiwa yang telah berlangsung. Tingginya harapan masyarakat akan terwujudnya *good corporate governance* dan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme membutuhkan peningkatan peran dari pengawasan internal (Komang Gunayanti A dan Badera, 2015).

Laporan keuangan yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, maka harapan dari masyarakat luas akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi tidaklah salah. Dengan dilakukannya pemeriksaan ini dapat diketahui pelaksanaan kegiatan telah sesuai atau tidak dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan selanjutnya akan menjamin bahwa tercapainya tujuan kegiatan telah sesuai atau tidak dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan selanjutnya akan menjamin bahwa tercapainya tujuan kegiatan yang hemat, efisien dan efektif.

Kasus yang terjadi di Pelindo II pada tahun 2015 yaitu kasus korupsi yang mana menuntut kerjasama antara BPK dan BPKP serta Polri untuk mengusut kasus tindakan korupsi di Jawa Tengah, yang dimana hasil audit yang dilakukan tidak kunjung disampaikan kepada Polri sehingga penanganan kasus ini menjadi lamban ([www.beritajateng.net](http://www.beritajateng.net)). Kasus lain yang terjadi di Sumatra Selatan pada tahun 2015 yang dimana masyarakat mempertanyakan kinerja auditor yang bekerja di BPK dan BPKP Provinsi dalam mengusut kasus korupsi yang telah satu tahun berhenti dalam proses pemeriksaan, karena hasil audit yang tidak kunjung dipublikasikan, selain itu tidak terbukanya BPK dan BPKP dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat menjadikan masyarakat terus mempertanyakan tentang bagaimana kinerja auditor pemerintahan yang dimana mereka telah dibiayai oleh negara untuk memepertanggung jawabkan hasil kinerjanya dalam mengusut kasus korupsi (<https://mudanews.com/regional/2019/09/27/bpkp-sumut-mahasiswa-tagih-hasil-audit-bpkp-terkait-korupsi-dbh-pbb/.com>)

Salah satu kasus di Jawa Timur yaitu pemalsuan hasil audit soal kasus korupsi Bawaslu yang di lakukan oleh auditor BPKP Jawa Timur, dimana pengacara tiga komisioner Bawaslu Jatim tidak terima dengan perbuatan pemalsuan tersebut dan ingin melaporkan etiknya ke internal induk instasinya (BPKP). Kuasa hukum tiga komisioner Bawaslu Jatim itu juga akan menyeret penyidik dari Subit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim maupun jaksa penuntut umum dari kejaksaan tinggi Jatim. Pemalsuan hasil audit tersebut didapat dari persidangan Tipikor Surabaya Juanda, dalam persidangan tersebut Andreas

Pardede tidak pernah diklarifikasi audit BPKP tentang penggunaan dana hibah Pilgub 2013. Tetapi bukti yang disampaikan di persidangan, ada tanda tangan Andreas Pardede, sedangkan dua komisioner lainnya tidak pernah di klarifikasi. Sedangkan menurut SOP BPKP harus ada klarifikasi dengan yang pihak yang bersangkutan. Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh auditor BPKP mengenai ketiga komisioner Bawaslu Jatim didakwa melakukan korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013 untuk perjalanan dinas, salah satunya ada yang didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 71.500.000 sampai Rp 76.000.000. (<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-3362446/hasil-audit-bpkp-kasus-korupsi-bawaslu-jatim-dipalsukan-berbuntut-panjang.com>)

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena dalam teori ini menganggap bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara faktor-faktor yang berasal dalam diri seseorang seperti kemampuan, pengetahuan atau usaha, dan faktor-faktor yang berasal dari luar seperti keberuntungan, kesempatan dan lingkungan (Heider, 1958). Berdasarkan fenomena yang di angkat oleh peneliti, menunjukkan bahwa auditor harus memiliki sikap hati-hati dan kecermatan dalam menangani sebuah kasus sehingga kasus yang terjadi atas tiga komisioner Bawaslu Jatim. Menurut penelitian Poppy Indriani (2014) tujuan pokok dari supervisi ialah menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan organisasi dapat dicapai dengan memuaskan. Dilakukannya Supervisi di tiap tim audit yang bekerja dilapangan telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku bagi seorang auditor, namun dapat terjadi perbedaan kondisi

dengan yang ada di lapangan. Seperti kurangnya pengalaman dan kompetensi orang yang diserahkan tugas sebagai supervisor. Memperhatikan target yang harus dituju sehingga banyak kasus korupsi tidak terungkap dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pimpinan BPK dan BPKP diharapkan dapat mengontrol kinerja anak buahnya yang berada di daerah. Sehingga memiliki visi yang sama antara BPK, BPKP dan Polri untuk membasmi tindakan korupsi. Posisi BPKP sebagai auditor yang berhubungan langsung atas perintah dari Presiden maka tuntutan tanggung jawab untuk mengemban amanah yang telah diberikan presiden semakin besar pula. Kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya potensi kelemahan ataupun penyimpangan dari bidang keuangan negara merupakan tugas utama BPKP, namun selain itu fungsi *atestasi*, *assurance* dan *consulting* yang berguna dalam upaya perbaikan proses *governance*, manajemen resiko dan system pengendalian yang diharapkan kedepannya menjadi lebih baik.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal dimana pemeriksaan terhadap proyek-

proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain. Sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri (Prabhawa, Herawati, & Putra, 2014).

Profesionalisme secara luas didefinisikan oleh Messier *et al* (2014:216), merujuk pada perilaku, tujuan, atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan atau kualitas yang memberi karakteristik atau menandai suatu profesi atau orang yang profesional (Ketut Ardy Prabhawa, Nyoman Trisna Herawati dan I Made Pradana Adi Putra, 2014). Auditor mampu dikatakan profesional dilihat dari kinerja yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dari atasan yang sesuai dengan tujuan organisasi dan sesuai dengan kode etik auditor. Tuntutan masyarakat yang menginginkan transparansi keuangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab auditor pemerintah, masyarakat sebagai penilai kinerja pemerintah menginginkan adanya sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan pemerintah yang baik agar pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Alfianto S, & Suryandari, 2015).

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan (Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, 2015 : 249). Hal ini mencakup perilaku perintah

atasan dan perilaku pemberi dukungan. Menurut Fradilla Septia Nalendra (2016), Faktor situasional yang mempengaruhi peningkatan kinerja auditor adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada auditor pemerintah sangat diperlukan, karena dapat memberikan nuansa pada kinerja auditor yang cenderung bisa formal maupun informal. Gaya kepemimpinan yang cenderung informal lebih menekankan pola keteladanan pimpinan, namun memberikan kebebasan yang lebih luas bagi auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih besar, akibatnya dari instrumen organisasi secara formal belum memadai. Sedangkan komitmen organisasi merupakan suatu hubungan antara anggota dengan organisasi, misalnya hubungan antara auditor dengan kantor dimana ia bekerja. Hubungan yang baik akan timbul apabila auditor memiliki kesetiaan dan mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi. Komitmen organisasi dipengaruhi juga oleh profesionalisme auditor dan juga berdampak pada kinerja auditor.

Menurut Mardiasmo (2018: 22) pengertian *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Menurut Fembriani dan Budiarta (2016), hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor yang memahami *good governance* secara benar maka akan memengaruhi perilakunya dalam melaksanakan pekerjaannya dengan orientasi memperoleh hasil yang baik sehingga kinerjanya akan meningkat. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisien,

penghindaran salah alokasi dana, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Dari teori tersebut *Good Governance* merupakan tata pemerintahan, penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, dengan menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Supervisi merupakan tindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan (Poppy, 2014). Seiring dengan perjalanan waktu, supervisi dikatakan sebagai proses yang dinamis. Unsur supervisi merupakan pemberian intruksi kepada asisten agar tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam dunia audit, mengulas kembali pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat dari staf audit kantor akuntan. Luasnya ruang lingkup dalam supervisi yang memadai dalam suatu keadaan tergantung atas beberapa faktor, salah satunya kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit. (PSA No. 05 SPAP 2011), Pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Pengalaman dalam menemui atau menghadapi klien yang berbeda-beda menjadi bekal bagi auditor junior dalam menjalankan audit untuk ke depannya, dan banyaknya pengalaman yang dimiliki atau didapat auditor bisa lebih cepat dan tanggap dalam

menghadapi sebuah permasalahan yang mungkin akan timbul selama proses melaksanakan audit.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BPKP Jawa Timur. Peneliti memilih BPKP Jawa Timur dikarenakan dekat dengan tempat tinggal sehingga mudah dalam mendapatkan data (membagi kuisioner) dan untuk memastikan apakah profesionalisme, gaya kepemimpinan, pemahaman *good governance*, dan peran supervisi dalam instansi ini telah dijalankan dengan baik sehingga dapat mengurangi terjadinya penurunan kinerja auditor BPKP Jawa Timur. Penelitian penting untuk dilakukan karena pada penelitian sebelumnya data yang digunakan berbeda, masih ada perbedaan antara penelitian satu dengan yang lainnya, dan bisa jadi bahan evaluasi bagi auditor yang membacanya karena di dalam penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFESIONALISME, GAYA KEPEMIMPINAN, PEMAHAMAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PERAN SUPERVISI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH BPKP JAWA TIMUR”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hasil penjelasan dari latar belakang masalah maka didapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Maka perumusan masalah yang didapat yaitu :



1. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor Pemerintah?
3. Apakah pemahaman *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor Pemerintah?
4. Apakah Peran Supervisi berpengaruh terhadap kinerja auditor Pemerintah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengembangkan dari hasil riset sebelumnya dan menguji kembali yaitu :

1. Menganalisis apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor Pemerintah?
2. Menganalisis apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor Pemerintah?
3. Menganalisis apakah pemahaman *Good Governance* berpengaruh terhadap auditor Pemerintah?
4. Menganalisis apakah Peran Supervisi berpengaruh terhadap auditor Pemerintah?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apa saja variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah, serta variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam mengenal subyek-subyek penelitian dan penulisan akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini nantinya berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang ada sesuai dengan topik dari berbagai literature, landasan teori mengenal beberapa subyek, kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana penelitian ini meringkas permasalahan yang ada, dan memunculkan hipotesis pada penelitian ini.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, unit yang di analisis, preporsisi, daftar pertanyaan, responden dan teknik yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.

